

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PEMBATALAN PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN

Oleh :

NANDO ARILMA PUTRA

NOMOR BP : 1510111003

Dosen Pembimbing : Dr. Dahlil Marjon, S.H, M.H

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK 1)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa:	No. Alumni Fakultas:
	NANDO ARILMA PUTRA	
a) Tempat/Tanggal lahir: Pariaman/02 November 1996	d) Tanggal Lulus: 20 Juni 2022	
b) Nama Orang Tua : Asril dan Martinis	e) Predikat Lulus: Memuaskan	
c) Fakultas: Hukum	f) IPK : 3.36	
d) Program Kekhususan: Hukum Perdata	g) Lama Studi :6 Tahun 11 Bulan	
e) No. BP : 1510111003	h) Alamat : Jl. Syekh Burhanuddin, sunur barat, nan sabaris, kabupaten padang pariaman.	

**IMPLEMENTASI PEMBATALAN PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
AGAMA KOTA PARIAMAN**

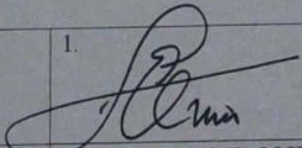
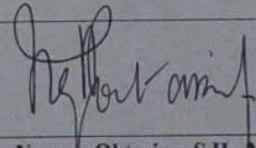
(NANDO ARILMA PUTRA, 1510111003, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 halaman, 2022)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambaNya di dunia ini menjadi tenteram. Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi pembatalan perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pariaman? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi pembatalan perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pariaman?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Dalam pelaksanaannya pembatalan perkawinan terdapat berbagai kendala baik dari segi kesiapan para pihak dalam menghadapi pernikahan dan perceraian, pembekalan bimbingan pra nikah yang kurang intensif dan hanya dianggap sebagai salah satu legalitas dalam administrasi pendaftaran pernikahan, hingga ketidakhadiran pihak termohon dalam persidangan pembatalan perkawinan membuat implementasi dari pembatalan perkawinan sedikit terganggu, bahkan pengetahuan masyarakat dalam hal pembatalan perkawinan pun terbilang cukup rendah dan berakibat dalam hal pelaksanaannya.

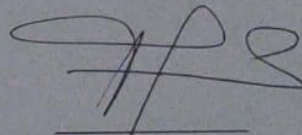
Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juni 2022.

Penguji		
Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Linda Elmis, S.H., M.H	Neneng Oktarina, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Dr. Dahli Marjon, SH., MH**


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan: